

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kebutuhan data yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Mengingat keterbatasan peneliti dalam waktu, tenaga dan biaya, dari 10 desa miskin di Pesisir Kabupaten Subang diambil desa-desa yang memiliki pantai, ada 2 (dua) yaitu Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pangarengan Kecamatan Legonkulon .

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah 6 bulan, meliputi persiapan hingga pengumpulan data, yang dilaksanakan antara bulan September 2005 – Februari 2006.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian ini, ruang lingkup akan dibatasi pada analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Subang dan analisis realitas kemiskinannya untuk memperoleh format kebijakan baru yang lebih baik.

3.3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: inventarisasi, koleksi, analisis–sintesis dan pelaporan. Berikut uraian setiap tahapnya.

1. Inventarisasi data; baik data primer maupun data sekunder dimaksudkan untuk (1) mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, (2) identifikasi kondisi sumberdaya alam, (3) identifikasi pemanfaatan sumberdaya alam oleh stakeholder saat ini, (4) identifikasi pengelolaan sumberdaya alam saat ini (termasuk kebijakan dan hukum) (5) identifikasi keberpihakan kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap kelompok miskin. Tahap ini diharapkan dapat selesai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan
2. Koleksi data dilakukan berdasarkan jenisnya. Jenis data yang diperlukan/ dikoleksi dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi peta

wilayah, data demografi, data sejarah, dokumen/naskah kebijakan pembangunan dan sejenisnya yang telah tersedia, bahkan mungkin telah diolah dan dipublikasikan secara umum. Jenis data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai pihak seperti instansi terkait, atau pusat-pusat dokumentasi yang ada. Sedangkan data primer merupakan data yang langsung digali dari realitas lapangan. Beragamnya data primer yang hendak diambil, memerlukan beberapa teknik seperti berikut:

- (a) Kuesioner
- (b) Wawancara mendalam (*indepth interview*)
- (c) Observasi
- (d) Diskusi kelompok terarah (*Focused Group Discussion/FGD*)

Penggunaan ke-4 teknik pengambilan data di atas dilakukan secara bergantian yang fleksibel saling melengkapi dengan harapan dapat mengeliminasi kekurangan salah satu teknik sehingga diperoleh data yang terbaik, mengingat masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggalan data dengan banyak teknik ini dapat bermanfaat sebagai *cross-check* validitas data.

3. Tahap analisis dan sintesis data dilakukan setelah data inventarisasi diperoleh. Analisis realitas kemiskinan dilakukan lebih dahulu, kemudian diikuti dengan analisis kebijakan dan dilanjutkan dengan memformat kebijakan baru yang lebih baik.
4. Tahap penulisan laporan sebagai tahap terakhir setelah tahap analisis-sintesis diselesaikan.

3.4. Unit Analisis

Sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini, maka ditetapkan 3 (tiga) level unit analisis. Ketiga level unit analisis adalah makro, meso dan mikro (Adrianto, 2004). Ketiga level unit analisis penelitian ini dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 1. Peta Unit Analisis Penelitian

No	Level	Unit Analisis	Keterangan
1	Mikro	Rumahtangga	Sampel : 85 dan 70 semua: 2 desa
2	Meso	Desa miskin yang memiliki garis pantai	
3	Makro	Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Subang	

Sumber: Data Primer 2005

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh unit analisis di daerah penelitian, karena unit analisis penelitian ini adalah rumahtangga yang berjumlah 1 747 rumahtangga Desa Patimban dan 1 137 rumahtangga Desa Pangarengan.

Adapun sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan standar penelitian 5% untuk populasi homogen, (Singarimbun, dan Sofyan Efendi, 1989), maka ditetapkan 85 rumahtangga Desa Patimban dan 70 rumahtangga Desa Pangarengan.

3.6. Teknik Sampling

Untuk memenuhi kebutuhan data, teknik sampling yang dipilih ada 2 (dua) yaitu (1) *stratified random sampling* dan (2) *purposive sampling*. *Stratified random sampling* dilakukan dengan cara menstrata populasi ke dalam kelas pendapatan, selanjutnya masing-masing kelas diambil sampel secara acak dengan jumlah 71:9:5 untuk Desa Patimban dan 45:18:7 untuk Desa Pangarengan. Sedangkan *purposive sampling* dilakukan terhadap kasus khusus, sesuai dengan kebutuhan data / analisis terutama mengenai dinamika kemiskinan rumahtangga seperti perubahan dari kaya menjadi miskin, atau sebaliknya dari miskin menjadi kaya dan varian kemiskinan yang tidak mengalami perubahan dari generasi ke generasi yang tetap miskin dan tetap kaya pada level mikro. Pada level meso *purposive sampling* dilakukan pada 2 (dua) desa miskin yang memiliki pantai.

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Analisis Kemiskinan

Analisis kemiskinan meliputi:

1. *Headcount Index*, secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan sebagai miskin, dinotasikan dengan P_o . Secara formal menurut BPS dan Bank Dunia (2002) adalah sebagai berikut:

$$P_o = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(Y_i < z) = \frac{N_p}{N} \quad \text{-----} \quad (1)$$

Dimana N adalah total populasi dan $I(Y_i < z)$ adalah fungsi indikator yang mempunyai nilai 1 jika pernyataan dalam kurung benar, dan 0 jika tidak. Jadi jika pengeluaran (Y_i) kurang dari garis kemiskinan (z), maka $I(Y_i < z)$ sama dengan 1 dan rumah tangga bersangkutan akan dihitung sebagai miskin. N_p adalah total jumlah penduduk miskin.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*)

Ukuran kemiskinan yang cukup populer adalah indeks jurang kemiskinan (*Poverty Gap Index*). Indeks ini menghitung seberapa jauh individu jatuh di bawah garis kemiskinan (jika mereka termasuk dikategori miskin). Indeks dinyatakan sebagai suatu persentase terhadap garis kemiskinan.

Secara lebih spesifik, mendefinisikan jurang kemiskinan (*Poverty Gap*) sebagai garis kemiskinan dikurangi pendapatan/pengeluaran sebenarnya (Y_i) dari individu/penduduk yang miskin; jurang (*gap*) bernilai 0 untuk mereka yang tidak miskin (BPS dan Bank Dunia, 2002). Dengan menggunakan fungsi indeks, kita mempunyai

$$G_n = (z - y) \cdot I(Y_i < z). \quad \text{-----} \quad (2)$$

Maka *poverty gap index* (P_i) dapat ditulis sebagai

$$P_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{G_n}{z} \quad \text{-----} \quad (3)$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/Squared Poverty Gap Index*)

Ukuran yang digunakan oleh Foster, Greer dan Thorbecke (1984) yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{Z} \right)^{\alpha} \quad \text{-----} \quad (4)$$

dimana α adalah suatu ukuran sensisivitas dari indeks terhadap kemiskinan dan z adalah garis kemiskinan, nilai pengeluaran per kapita rumah tangga orang ke- j adalah x_j , dan *poverty gap* untuk individu j adalah $G_i = z - x_i$ (dengan $G_i = 0$ jika $x_i \geq z$). Jika parameter $\alpha = 0$, P_0 merupakan *headcount index*. Semua $\alpha > 0$, ukuran menurun pada standar hidup orang miskin (semakin rendah standar hidup seseorang, semakin miskin mereka digolongkan). $\alpha > 1$ indeks, bahwa meningkatnya kemiskinan dengan turunnya standar hidup menjadikan orang miskin tersebut semakin miskin.

3.7.2. CLSA

Coastal livelihood system analysis (CLSA) mencermati 5 *asset capital (AC)* meliputi *natural asset capital (NAC)*, *human asset capital (HAC)*, *social asset capital (SAC)*, *financial asset capital (FAC)* dan *man-made asset capital (MAC)*. Data lapangan tentang *asset capital* masing-masing diskor dengan cara berikut:

Tabel 2. Kriteria dan skoring *Natural asset capital (NAC)*

No	Kriteria (NAC)	Skor	Kriteria (NAC)
1	Tidak ada lahan pekarangan	0 1 2 3	Lahan pekarangan luas
2	Tidak ada air bersih	0 1 2 3	Air bersih melimpah
3	Tidak ada ekosistem pesisir	0 1 2 3	Ekosistem pesisir baik-melimpah
4	Tidak ada oseanografi	0 1 2 3	Oseanografi kondusif
5	Tidak ada pantai	0 1 2 3	Pantai stabil
6	Tidak ada perikanan	0 1 2 3	Perikanan produktif optimal
7	Tidak ada peternakan	0 1 2 3	Peternakan produktif optimal
8	Tidak ada pertanian	0 1 2 3	Pertanian produktif optimal

Tabel 3. Kriteria dan skoring *Human Asset Capital (HAC)*

No	Kriteria (HAC)	Skor	Kriteria (HAC)
1	Tidak ada sarana pendidikan	0 1 2 3	Tersedia sarana pendidikan baik dan memadai
2	Tidak ada tenaga pendidik	0 1 2 3	Tersedia tenaga pendidik baik dan memadai
3	Tidak ada partisipasi masyarakat	0 1 2 3	Partisipasi masyarakat tinggi
4	Tidak ada BOS	0 1 2 3	Tersedia BOS
5	Tidak ada sarana kesehatan	0 1 2 3	Tersedia sarana kesehatan baik dan memadai
6	Tidak ada tenaga ahli medis	0 1 2 3	Tersedia tenaga ahli medis baik dan memadai
7	Tidak ada Jamkesmas	0 1 2 3	Teersedia Jamkesmas

Tabel 4. Kriteria dan skoring *social asset capital (SAC)*

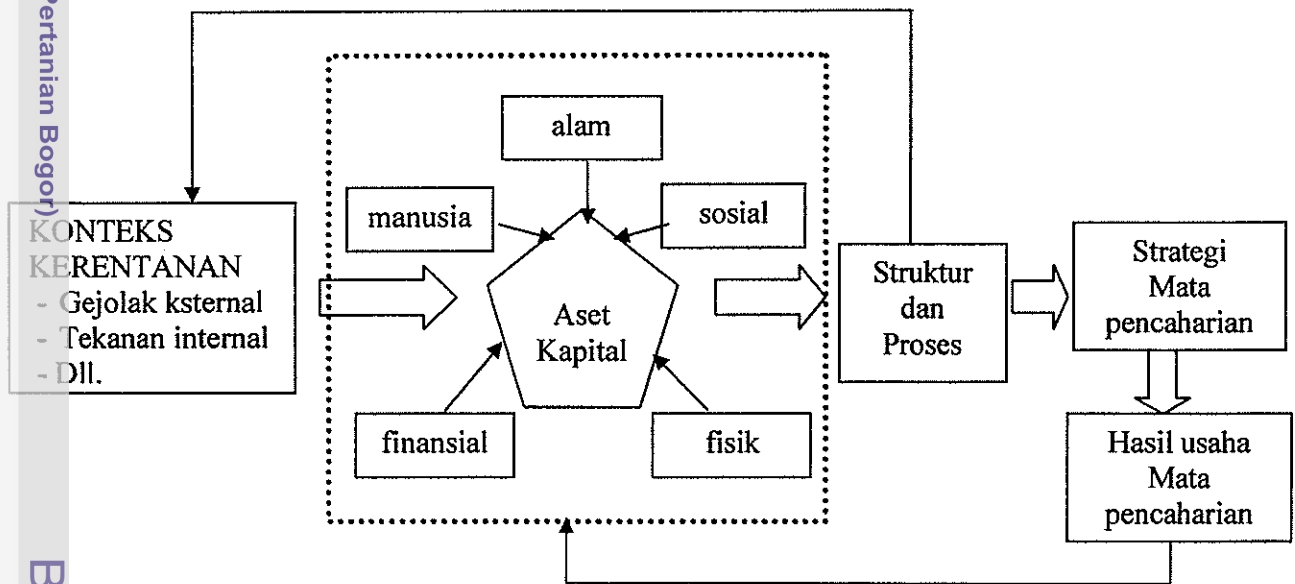
No	Kriteria (SAC)	Skor	Kriteria (SAC)
1	Tidak ada jaringan sosial yang kondusif bagi kohesivitas	0 1 2 3	Ada jaringan sosial yg kondusif bagi kohesivitas kuat dan luas
2	Tidak ada adat budaya produktif	0 1 2 3	Ada adat budaya produktif kuat
3	Tidak ada sistem pengelolaan sumberdaya pesisir	0 1 2 3	Ada sistem pengelolaan sumberdaya pesisir baik
4	Tidak ada lembaga sosial	0 1 2 3	Ada lembaga sosial berfungsi baik
5	Tidak ada manajemen konflik	0 1 2 3	Ada manajemen konflik dan berfungsi dengan baik
6	Tidak berkembang budaya konsumtif	3 2 1 0	Budaya konsumtif luas-mengakar

Tabel 5. Kriteria dan skoring *Financil Asset Capital (FAC)*

No	Kriteria (FAC)	Skor	Kriteria (FAC)
1	Tidak tersedia dana segar	0 1 2 3	Tersedia dana segar yang cukup
2	Tidak ada lembaga keuangan formal	0 1 2 3	Ada lembaga keuangan formal
3	Tidak ada lembaga keuangan informal	0 1 2 3	Ada lembaga keuangan informal
4	Tingkat pengembalian lemah	0 1 2 3	Tingkat pengembalian baik
5	Tidak ada proyek bantuan	0 1 2 3	Ada proyek bantuan

Tabel 6. Kriteria dan skoring *Man-made Asset Capital (SAC)*

No	Kriteria (MAC)	Skor	Kriteria (MAC)
1	Tidak ada saluran air bersih	0 1 2 3	Ada saluran air bersih
2	Tidak ada sumur	0 1 2 3	Ada sumur
3	Tidak ada MCK	0 1 2 3	Ada MCK
4	Tidak ada perumahan	0 1 2 3	Ada perumahan
5	Tidak ada jalan raya	0 1 2 3	Ada jalan raya
6	Tidak ada jembatan	0 1 2 3	Ada jembatan
7	Tidak ada TPI	0 1 2 3	Ada TPI
8	Tidak ada pasar	0 1 2 3	Ada pasar
9	Tidak ada jaringan listrik	0 1 2 3	Ada jaringan listrik
10	Tidak ada jaringan telepon	0 1 2 3	Ada jaringan telepon
11	Tidak ada IPAL	0 1 2 3	Ada IPAL
12	Tidak ada tempat ibadah	0 1 2 3	Ada tempat ibadah

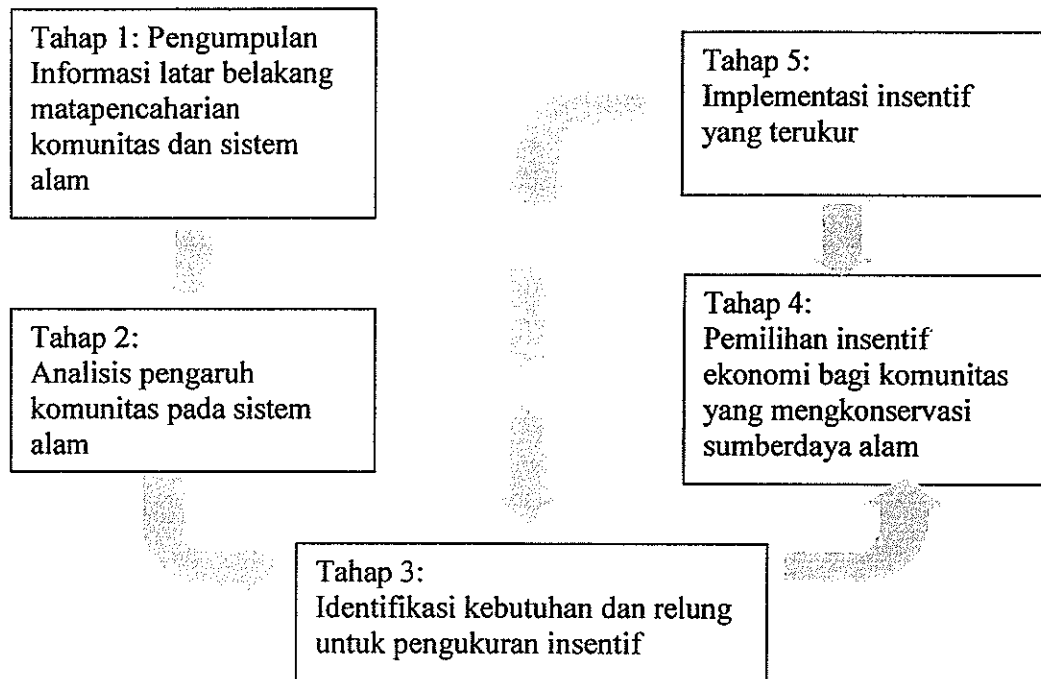


Gambar 12. Kerangka CLSA (Adrianto, 2005).

Implementasi kerangka *CLSA* mengikuti 5 tahapan Adrianto (2005), sebagai berikut:

1. Identifikasi informasi lingkungan hidup komunitas dan sistem alam.
2. Analisis pengaruh komunitas pada sistem alam
3. Identifikasi kebutuhan tempat/relung untuk penerapan insentif.
4. Pemilihan insentif yang sesuai bagi komunitas yang mengkonservasi sumberdaya alam
5. Implementasi insentif dalam pengelolaan sumberdaya.

Sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 13. Tahapan Desain Implementasi *CLSA* dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (Adrianto, 2005).

3.7.4. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dilakukan dalam dua cara yaitu yang pertama adalah analisis dokumen kebijakan dan yang kedua *Participatory Poverty Assesment (PPAs)*. Dari dokumen kebijakan dilakukan analisis terhadap beberapa hal yaitu proporsional anggaran dan proporsional kegiatan program/proyek yang dimuat dokumen terhadap proporsional penduduk miskin.

PPAs dilakukan sebagai *cross check* hasil analisis dokumentasi (naskah kebijakan) secara partisipatif yang melibatkan kelompok miskin. Beberapa poin yang dijadikan pusat perhatian Gee with Norton (2000) adalah sebagai berikut.

- Komitmen untuk membantu kelompok miskin keluar dari kemiskinannya.
- Kesesuaian penetapan prioritas dengan akar permasalahan yang berkembang.
- Pengalokasian anggaran yang rasional dalam pertimbangan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Kejelasan dan kesesuaian/ketepatan sasaran
- Pemanfaatan aset lokal secara arif dan bijaksana